



JSAP: Journal Syariah and Accounting Public

ISSN: 2622-3538

Available Online at <https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index>

Vol. 6, No. 2 Desember 2023

DOI: 10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2632

ANALISIS PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKA DALAM PERSPEKTIF WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN

Putri Giovani Panggabean¹, Ina Liswanty²

1. Program Studi Akuntansi Universitas Potensi Utama, Medan, Sumatera Utara

2. Program Studi Akuntansi Universitas Potensi Utama, Medan, Sumatera Utara

Email: putrigiovani127@gmail.com, inaliswanty24@gmail.com²

Abstract:

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang di tetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan modernisasi sistem perpajakan dapat mempermudah wajib pajak pribadi atau badan lebih mudah membayar dan melapor pajak di KPP Medan Belawan setelah diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data untuk mendapatkan informasi tanpa mengubah apapun dari data tersebut. Penulis mengumpulkan data dengan meminta data/informasi yang dibutuhkan pada KPP Medan Belawan serta mewawancarai wajib pajak yang terdaftar pada KPP Medan Belawan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis untuk penyusunan Tugas Akhir. Dari hasil penelitian ternyata ada beberapa kendala yang dirasakan wajib pajak dalam pelaporan dan penerapan sistem modernisasi pajak, juga ketidakefisienan sistem yang berlaku pada penerapan modernisasi sistem perpajakan.

Kata Kunci : modernisasi, sistem, perpajakan, administrasi.

Modernization of the tax administration system is a form of implementation of various programs and activities stipulated in the medium-term tax administration reform. This research aims to find out whether the implementation of modernization of the tax system can make it easier for individual or corporate taxpayers to pay and report taxes at the Medan Belawan KPP after the implementation of a modern tax administration system. This research uses a descriptive method, namely processing data to obtain information without changing anything from the data. The author collected data by requesting the required data/information from the Medan Belawan KPP and interviewing taxpayers registered with the Medan Belawan KPP to obtain the information the author needed for the preparation of the final assignment. From the research results, it turns out that there are several obstacles felt by taxpayers in reporting and implementing the tax modernization system, as well as system inefficiencies that apply to implementing the modernization of the tax system.

Keywords : modernization, system, tax, administration.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut pemerintah perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Reformasi perpajakan di Indonesia diawali dengan perubahan yang mendasar mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakannya. Selain itu juga dilakukan pembaharuan dalam sistem perpajakannya, dengan meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam rangka memahami, menguasai, dan melaksanakan peraturan perpajakan yang baru. Pembaharuan sistem ini yaitu sistem pemungutan pajak dimana yang sebelumnya dilakukan secara official assessment system berubah menjadi self assessment system. Salah satu cara yang ditempuh guna menghasilkan reformasi adalah dengan modernisasi administrasi perpajakan Tujuan modernisasi adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance).

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan realisasi kepatuhan wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di tahun 2022 sebesar 83,2%. Kendati tak capai 90%, tetapi angka ini telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar 80%. "Di tahun 2022 kemarin yang sudah kami record sampai dengan hari ini bahwa secara keseluruhan penyampaian SPT sudah berada di angka 83,2% dari target 80% wajib pajak yang menyampaikan SPT di tahun 2022 kemarin," ungkapnya dalam konferensi pers APBN 2022, Selasa (3/1/2023).

Tabel 1.1
Jumlah wajib pajak orang pribadi yang lapor SPTKPP Pratama Medan Belawan

Tahun pajak	SPT tahunan PPh OP S	SPT tahunan PPh OP S	SPT tahunan PPh OP
2021	13.570	15.635	3.673
2022	12.961	7.974	3.290
2023	-	-	-

Tabel 1.2
Persentase kepatuhan pelaporan SPT oleh WP OP KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Persentase kepatuhan pelaporan SPT oleh WP OP
2021	34.64
2022	45.09

Tabel 1.3
Data jumlah Wajib Pajak Badan dan OP KPP Pratama Medan Belawan

Tahun pajak	WP badan terdaftar	WP OP terdaftar
2021	533	8.255
2022	601	9.735
2023	251	3.156

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa ada beberapa peningkatan dan penurunan kepatuhan wajib pajak pada pelaporan SPT baik pada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Pada KPP Pratama Medan belawan tahun 2021 terdapat 34.64 % kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT tahun nya, sedangkan tahun 2022 ada 45.09 % kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT tahun nya. Terdapat kenaikan, sedangkan tahun 2021 jumlah wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT

ada 13.570 wajib pajak sedangkan tahun tahun 2022 ada 12.961 wajib pajak yang melaporkan SPT nya, terdapat penurunan.

Karena hal itu, peneliti ingin tahu apakah dengan sistem modernisasi administrasi perpajakan wajib pajak akan semakin taat melaporkan SPT Tahunannya atau tidak. Dimana program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance yakni penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang handal dan terkini.

Bersumber pada penjelasan di atas, sehingga pengarang terpicat buat membiarkan riset dalam perpajakan dengan kepala karangan **“Analisis penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam perspektif wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi Pajak

Pajak ialah salah satu pangkal pendapatan negeri yang amat berarti, buat bisa menciptakan serta tingkatan pembangunan nasional dalam bagan tingkatan kelimpahan serta kesejahteraan warga. Tanpa pajak, pembangunan tidak hendak berjalan mudah sebab besarnya pembiayaan yang dibutuhkan tidak hendak dapat ditutupi dengan pinjaman serta dorongan luar negara. Oleh sebab itu, warga diharapkan berfungsi aktif dalam meningkatkan penerimaan negara, dan terdapat pada kapasitas negara.

Fungsi Pajak

Tujuan mendasar dan keuntungan pajak seiring perkembangannya disebut dengan fungsinya. (Official, 2014) menyatakan bahwa pajak memiliki dua tujuan: fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi regulasi (regularend).

Asas Pemungutan Pajak

menurut Rimsky (1999: 17-20) perlu memperhatikan asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation*, mengenai “The Four Maxims” sebagai berikut:

1. Asas equality
2. Asas certainty

3. Asas Convenience of Payment
4. Asas Efficiency

Modernisasi sistem perpajakan

Pengertian modernisasi sistem perpajakan

Program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep modernisasi administrasi perpajakan didasarkan pada penerapan “layanan prima”, “pemantauan insentif” dan “tata kelola yang baik”. Modernisasi administrasi perpajakan pada dasarnya meliputi:

1. Restrukturisasi organisasi
2. Meningkatkan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
3. Peningkatan manajemen sumber daya manusia.

Sejak dijalkannya reformasi perpajakan tahun 1983 terdapat beberapa perubahan mendasar dalam wajah perpajakan Indonesia. Perubahan tersebut mencakup pembaruan kebijakan perpajakan (Tax Policy Reform) melalui perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). Perubahan tersebut ditujukan guna memberikan kepastian hukum bagi sistem perpajakan Indonesia sehingga pencapaian penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Reformasi pajak tersebut mencakup 3 pilar, yaitu Kebijakan Pajak (Tax Policy), Administrasi Pajak (Tax Administration), dan Peraturan Pajak (Tax Law). Salah satu pembaruan yang berjalan cukup signifikan dan menjadi kunci dalam proses pemungutan pajak adalah pembaruan administrasi perpajakan (Tax Administrative Reform).

Secara universal, administrasi pajak merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan pajak. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan harus dilakukan secara

berkesinambungan sehingga fungsi pelayanan dapat diberikan secara optimal kepada masyarakat. Reformasi administrasi pajak idealnya merupakan instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP, meningkatkan kepercayaan masyarakat (trust), dan meningkatkan integritas aparat pajak. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Ironisnya, kepatuhan pajak Indonesia masih terbilang rendah, yang tergambarkan dalam stagnasi tax ratio yang masih berada di bawah negara lain pada kisaran 12-13 persen.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Pendekatan riset ini merupakan memakai tata cara kualitatif (deskriptif). Bagi (Ramdhan, 2021), riset kualitatif merupakan metode riset yang menciptakan informasi deskriptif kualitatif berbentuk tutur-tutur tercatat ataupun perkataan dari orang-orang serta sikap yang dicermati. Tata cara riset deskriptif bermaksud buat melukiskan dan mendefinisikan bermacam kenyataan serta kejadian yang ditemui setelah itu menghubungkannya antara satu dengan yang lain. Pangkal informasi pada riset ini merupakan informasi pokok. Informasi pokok merupakan pangkal informasi yang langsung membagikan informasi pada periset buat menampung informasi, Sebaliknya informasi inferior merupakan pangkal informasi yang tidak langsung membagikan informasi pada pengumpul informasi (Sugiyono, 2017). Informasi pokok dalam riset ini merupakan informasi tanya jawab, serta pemilihan.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2017) mengatakan kalau pengumpulan informasi dicoba pada situasi yang alami, pangkal informasi pokok, serta lebih banyak pada pemantauan berfungsi dan, tanya jawab mendalam serta pemilihan. Metode pengumpulan informasi yang dicoba dalam riset ini merupakan:

- a. Wawancara
- b. Studi Perpustakaan
- c. Searching di internet

d. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Langkah analisa informasi merupakan mempersiapkan serta menata analisa informasi yang berbentuk informasi bacaan, semacam dalam transkrip, ataupun gambar. Setelah itu kurangi informasi kedalam tema lewat cara kondensasi coding, serta kesimpulannya menyuguhkan informasi dalam wujud nilai, table ataupun sesuatu dialog. Analisa informasi ini ialah sesuatu pendekatan yang besar serta tidak cuma menganalisa bacaan serta lukisan, namun mencakup pula pengorganisasian informasi, melaksanakan uraian kata pengantar kepada database, mengode serta mengerahkan tema, menyuguhkan informasi, serta membuat pemahaman informasi (Bandur, 2016).

Dalam metode analisa riset ini NVivo dikira oleh pengarang sanggup selaku alat atau alat dalam menghimpun, membagi ataupun menggambarkan informasi, cara pengerjaan informasi dalam riset ini mempunyai sebagian langkah ialah:

1. Coding

Isyarat dalam analisa informasi kuantitatif merupakan tutur ataupun frasa pendek pendek yang sangat kerap timbul dengan cara simbolis membagikan ijmal, inti yang muncul, kesimpulan utama permasalahan ataupun ciri yang membangkitkan ingatan dari suatu yang didasarkan bahasa ataupun informasi visual. Informasi bisa terdiri dari tanya jawab transkrip, memo lapangan pemantauan partisipan, jurnal, akta, kepustakaan, bagian informasi yang hendak dikodekan sepanjang cara pengkodean daur awal bisa berkisar dari satu tutur ke satu perkataan penuh sampai totalitas laman bacaan ke arus ilustrasi bergerak.

2. Analytical Maps

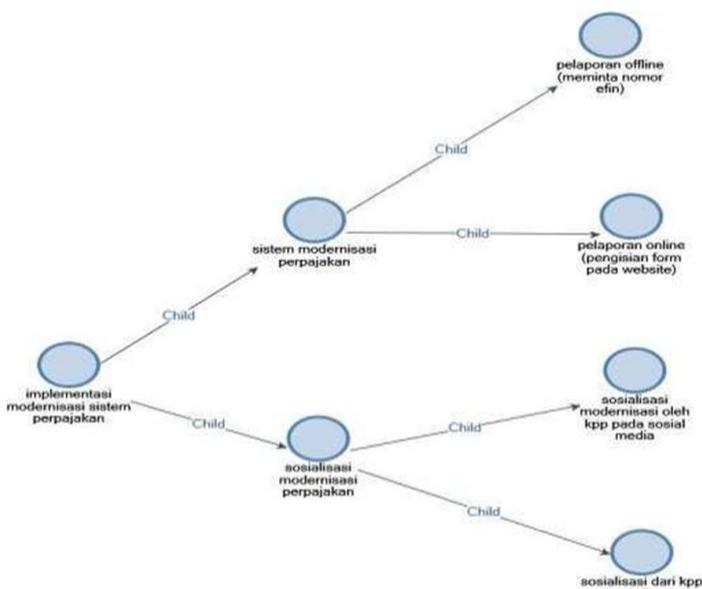
Analytical Maps merupakan membuat coretan ataupun gagasan (Map) mengenai riset. Pada langkah ini merupakan metode khusus buat menulis apa yang periset pikirkan serta dituangkan dalam wujud lukisan penggambaran dan mempunyai faedah untuk periset sendiri ataupun yang lain. Bagi pernyataan yang

diperkuat oleh Maxwell (Fatoni et al., 2022) dengan “membuat denah rancangan dini buat menolong memperjelas kerangka kegiatan abstrak ataupun teoritis yang melandasi riset”. Dalam aplikasi NVivo, denah rancangan, grafik alur ataupun bagan investigasi asli bisa terbuat memakai perlengkapan pemodelan serta dengan cara biasa diucap selaku bentuk.

Analisa informasi yang periset maanfaatkan dalam riset ini merupakan analisa informasi NVivo dengan aplikasi NVivo 11 Plus. Aplikasi NVivo 11 Plus ini merupakan suatu fitur lunak Qualitative Informasi Analysis(QDA) yang dibuat oleh QSR international. Aplikasi NVivo 11 Plus ini ialah suatu fitur lunak Qualitative Informasi Analysis(QDA) yang dibuat oleh QSR international. Aplikasi NVivo di konsep dengan bermacam berbagai set fitur inti serta dipakai buat melakukan suatu proyek- proyek riset kualitatif dengan pangkal berplatform bacaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan implementasi modernisasi sistem perpajakan pada kantor pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan



Gambar 4.1

Peta implementasi modernisasi sistem perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Sumber : Data Diolah Menggunakan Aplikasi Nvivo 11

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bentuk dari implementasi penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kantor pelayanan pajak pratama medan belawan :

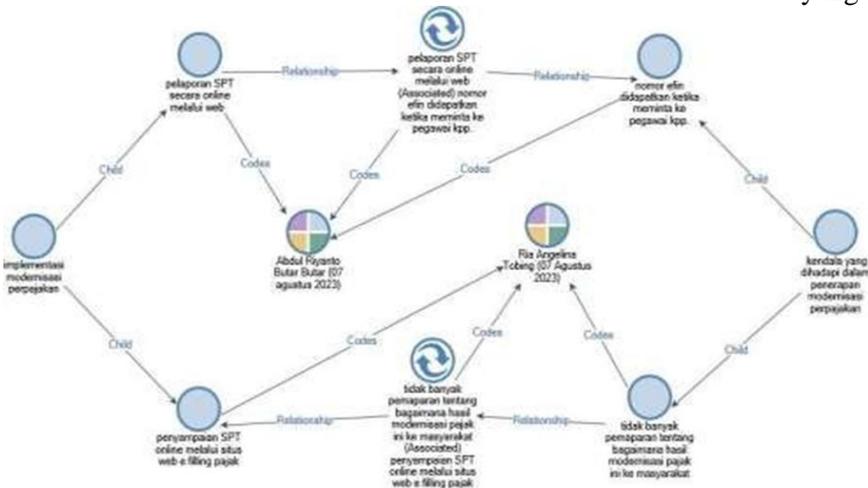
E-filing pajak merupakan bentuk modernisasi administrasi dari DJP sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online melalui melalui situs jejaring e-filing pajak dari DJP atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP. Hal ini bertujuan agar WP tidak perlu lagi melakukan pengisian SPT secara manual dan datang ke KPP untuk menyampaikan SPT-nya dengan antrian panjang yang memakan banyak waktu. Dengan demikian, compliance cost WP dapat berkurang.

Proses pelaporan SPT Online melalui sistem ini dimulai dengan dengan mengajukan permohonan pembuatan Electronic Filing Identification Number (EFIN) dengan mendatangi KPP terdekat. Setelah mendapatkan EFIN, WP dapat mendaftarkan diri dan melakukan e-filing di sistem e-filing pajak. Dengan terdaptarnya WP di sistem e-filing pajak, WP dapat mengisi SPT secara online maupun membuatnya secara offline terlebih dahulu melalui aplikasi e-SPT lalu mengunggah file csv sebagai output-nya ke sistem e-filing pajak.

2. Pembahasan Kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam modernisasi perpajakan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Gambar 4.2

Peta Analisis Kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam modernisasi perpajakan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan



Sumber : data menggunakan Aplikasi Nvivo 11

Dari gambar 4.2 dapat dilihat kendala dari penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Belawan :

1. Pelaporan yang tidak efisien

Hasil penelitian ini, wajib pajak merasa tidak efisien terhadap alur pelaporan SPT secara online yang dimana pada saat pendaftaran atau pelaporan SPT online diminta nomor efin. Nomor efin tersebut didapat apabila wajib pajak datang ke kantor pajak. Sedangkan pelaporan SPT dilakukan secara online, dan tujuan dibuatnya secara online agar wajib pajak tidak lagi perlu datang dan mengisi SPT secara manual ke KPP dengan antrean panjang dan memakan banyak waktu. Namun masih adaproses yang harus dilakukan secara offline.

Laporan pajak atau yang disebut juga Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan

penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan hak atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Pramitasari, 2022).

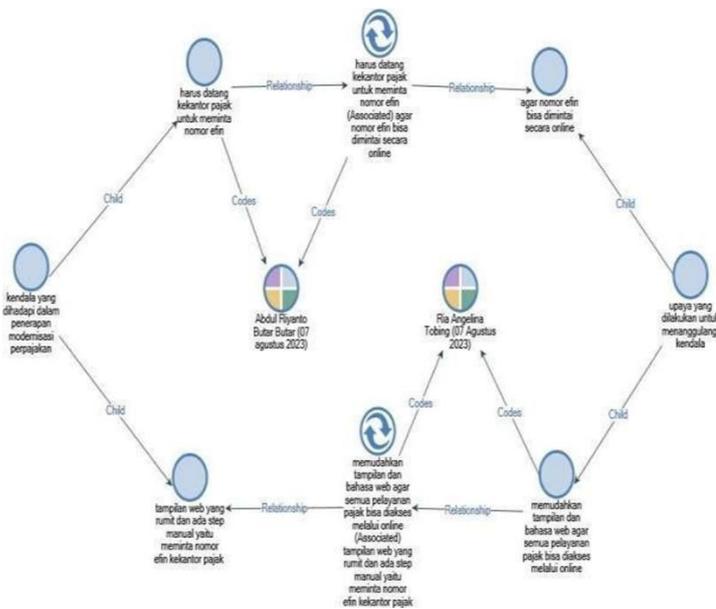
Maka hasil dari penelitian ini, pelaporan yang tidak efisien ini membuat wajib pajak yang bekerja susah untuk mengatur waktu dan membuat pekerja malas melaporkan SPT mereka. Para pekerja lebih memilih untuk denda daripada ribet untuk mengikuti alur pelaporan yang juga mengharuskan untuk melakukan proses offline yaitu meminta nomor efin.

2. Wajib pajak kurang memahami sistem dan bahasa pada laman web yang kurang dapat dimengerti oleh wajib pajak.

Kendala yang dihadapi juga terjadi karena wajib pajak kurang memahami sistem pelaporannya. Dimana wajib pajak harus mengisi form yang disediakan oleh kantor pajak pada website atau laman yang telah disediakan. Pada pengisiannya, wajib pajak menemukan pertanyaan yang bahasanya kurang dapat dimengerti untuk orang awam, karena banyak bahasa akuntansi pada form yang tertera, sehingga di proses pengisiannya wajib pajak perlu mencari tau arti arti dari bahasa tersebut melalui internet.

Sejalan dengan hasil wawancara dari Abdul Butar Butar “ dalam melaporkan SPT tahunan di webnya ada bahasa yang kurang kami mengerti seperti aktiva tetap, aktiva lancar. Jadi kami harus mencari tau dulu baru bisa mengisi webnya “. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memang ketidakefisienan, sistem dan bahasa yang kurang dapat dimengerti dapat menjadi alasan untuk wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan mereka.

3. Pembahasan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala modernisasi sistem perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan



Gambar 4.3

Peta Analisis Upaya Dilakukan Untuk Menanggulangi Kendala Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Sumber : data diolah menggunakan Aplikasi Nvivo 11

Dari gambar 4.3 dapat dilihat upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala dari penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kantor pelayanan pajak pratama medan belawan :

1. Mengefisienkan pelaporan secara online

E – filling merupakan bagian dari sistem pemungutan pajak yaitu self- assessment system, dimana pelaporan SPT secara online dilakukan oleh wajib pajak. Namun ternyata wajib pajak merasa tidak efisien dalm pelaporannya dikarenakan ada step manual yaitu meminta nomor efin ke kantor pajak, sedangkan pelaporannya dilakukan secara online. Wajib pajak berharap keefisienan pelaporan, yaitu nomor efin bisa diminta melalui online juga sehingga tujuan sistem modernisasi self- assessment pun dapat berjalan dengan baik.

Karna tujuan dari sistem tersebut agar pemerintah ingin memberikan kepercayaan dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiiban mereka kepada negara tanpa terbebani. Sejalan dengan hasil wawancara

abdul butar butar “alangkah baiknya nomor efin tersebut bisa diminta secara online.”

Dapat disimpulkan bahwa keefisienan proses pelaporan SPT pun dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan mereka. Sehingga tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT mereka.

2. Kantor pajak membuat sosialisasi untuk wajib pajak

Sosialisasi kepada wajib pajak yang baru mendaftar atau kepada wajib pajak yang lama tentang prosedur pelaporan dan pendaftaran SPT tahunan. Sosialisasi yang dilakukan agar wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dan bisa dengan mudah melaporkan dan membayar pajaknya.

Wajib pajak kurang mengetahui adanya informasi terbaru tentang prosedur atau sistem yang digunakan, sehingga wajib pajak bingung dalam pengisian pelaporan SPT tahunan tersebut. Sosialisasi mengenai bahasa bahasa dalam laman web juga perlu di diinformasikan kepada setiap wajib pajak, sehingga ketika pelaporan wajib pajak tidak melakukan kesalahan ataupun menjadi bingung.

Sosialisasi wajib pajak merupakan program yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk membrikan pemahaman dan pengetahuan tentang pajak. Wajib pajak sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan agar mengetahui dan memahami tatacara perpajakan yang berlaku saat ini (Wijaya & Yushita, 2019).

Ria angelina tobing mengatakan “ tidak banyak pemaparan tentang bgaimana hasil modernisasi pajak ini ke masyarakat, walaupun ada tidak banyak campaign untuk proses pembayaran atau pelaporan pajak ini. Lalu tampilan web yang terlalu rumit “

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan dengan benar dan cukup mudah dipahami bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak, maka hasil anlisis kendala pelaporan SPT tahunan pada kantor pajak medan belawan, kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak oleh kantor pajak. Seharusnya hal ini harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis dan melakukan penelitian, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaporan SPT yang tidak efisien membuat para wajib pajak bingung dan malas untuk melaporkan SPT tahunan mereka. Apalagi pekerja yang tidak memiliki waktu untuk datang ke kantor pajak untuk meminta nomor efin. Pelaporannya online tapi ada step manual yang harus dilakukan, hal itu membuat para wajib pajak lebih memilih denda dan tidak melaporkan SPT tahunan mereka ketimbang harus ribet datang ke kantor pajak atau harus sampai cuti.

2. Pada proses pengisian laporan SPT tahunan dengan tampilan web yang terlihat rumit juga bahasa yang kurang dapat dimengerti orang awam membuat wajib pajak juga merasa malas dan tidak mau melaporkan SPT tahunan.

3. Kurangnya informasi yang diperoleh wajib pajak membuat wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan, kurangnya sosialisasi oleh kantor pajak juga mempengaruhi pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak.

Referensi

<http://repository.potensiutama.ac.id/jspui/handle/123456789/2102?mode=full>

pernamasari, r. (2021). *analisis penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kembangan jakarta*. 1(1), 77–97.

rahmawati, y. a. (2014). *analisis modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak (studi empiris*

pada wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama surakarta).

Waluyo, T. (N.D.). *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya*.

[5] *Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. CV.Andi.*

[6] *Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Cv.Alfabeta.*

[7] *Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Cv.Alfabeta.*

[8] *Kemala.P.Lubis, & E, P. (2009). Analysis Of The Application Of E SPT In The Annual Tax Return Reporting Of Corporate Taxpayers At The Medan City Primay Tax Office.*

[9] *Aris. (N.D.). Diskusi Penggunaan E SPT. 2010. Http://Www.Ortax.Org*

[10] *Ardiani, d. (2018). Analisis kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-spt dalam melaporkan spt masa ppn p ada kpp pratama medan petisah.*

[11] *SISKA MAYASARI. (2019). Analisis Sistem Penggunaan E-Filling Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Spt) Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Pada Kpp Pratama Tebing Tinggi.*

[12] *ANGGRAINI, D. P. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.*

[13] *Hidayat, M. A. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pada KPP Pratama Medan Petisah.*

[14] *P, B., & K, J. (2013). Qualitatif Data Analysis With NVIVO (2nd ED).*

Washington DC.

[15] *J.Moleong.L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya.*

Alsuyukroni, Siti, and Ina Liswanty. "The Influence of Taxpayer Awareness, Fiscus Services, Tax Sanctions, Taxation System and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Medan Polonia." Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya Penelitian Ilmu Manajemen 9.2 (2023): 248-267.